**Kasus Dana Desa Tunggu Audit BPK**



Ilustrasi: [https://satujam.com/](https://satujam.com/pengertian-kerjasama/)

Pihak Polres Lampung Utara menunggu hasil audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan guna menyelesaikan dua kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran dana desa[[1]](#footnote-2) yang ada di daerah itu. “Kami menunggu hasil audit BPK guna mengetahui kerugian negara dalam dua kasus dugaan korupsi dana desa di Lampung Utara”, kata kasat Reskrim AKP Syahrial, Jumat (2/3).

Dia menyatakan selain menunggu audit BPK, pihaknya juga akan menggelar perkara dan sambil melengkapi pemberkasan yang diminta BPK Perwakilan Lampung. “ Kami akan gelar perkara dalam menangani dua kasus dugaan korupsi ini”, ujar dia.

Dua kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran dana desa yang ditanganu yakni pada anggaran tahun 2016 yang dikelola oleh Desa Tamanjaya, Kotabumi Selatan dan Desa Madukoro Baru Kotabumi Utara.

Hal sama diungkapkan kejari Kotabumi, lampung Utara yang saat ini menangani satu kasus dugaan korupsi penggunaan dana anggaran desa Tahun 2016 di Kecamatan Kotabumi Selatan. “Saat ini kami masih dalam tahap dimintai keterangan terhadap sejumlah saksi-saksi perangkat desa di kecamatan Abung Selatan”, kata kas Intel Kejari Kotabumi Dicky Zahrudin, kemarin.

Sumber Berita:

Lampung Post, Tanggal 3 Maret 2018: Kasus Dana Desa Tunggu Audit BPK

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan) menyatakan :
2. Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 1 angka 15 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4. Pasal 6 ayat (3) bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif dilakukan berdasarkan informasi awal yang bersumber dari internal maupun eksternal BPK. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

1. Pasal 10 ayat (1) bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 10 ayat (1) maka BPK memiliki kewenangan atas penghitungan kerugian negara.

Kewenangan ini juga dicantumkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

1. [Terkait korupsi disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi) yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. [↑](#footnote-ref-2)